PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

RAYEN SUZITRA
NIM. B1032211023

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	: Rayen Suzitra
Nim	: B1032211023
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Artikel	: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Barang Milik Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Artikel dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulisan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Artikel dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya

Pontianak, 6 Desember 2024



Rayen Suzitra
B1032211023

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Rayen Suzitra
NIM	: B1032211023
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Penerapan Standar Akuntansi Pemeritahan Berbasis Akrual Terhadap Barang Milik Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk saya nyatakan dengan denar.

Pontianak, 13 Januari 2025



Rayen Suzitra NIM.
B1032211023

LEMBAR YURIDIS

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

Penanggung Jawab Yuridis

Rayen Suzitra
B1034201016

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Ak. Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 10 Desember 2024

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
1.	Penguji 1	Dr. Muhammad Fahmi, S.E., M.M., CA, CPA, CRBC NIP. 19680608 199903 1 001	13/12/2024	
2.	Penguji 2	Umiaty Hamzani, S.E., M.Com., Ph.D NIP. 19801218 200312 2 001	13/12/2024	
3.	Penguji 3	Dr. Muhsin., S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA., CPA NIP. 19721001 200604 1 001	18/12/2024	
4.	Penguji 4	Ika Nur Azmi, S.E., M.Ak., Ak NIP. 19900315 202321 2 050	13/12/2024	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 19 DEC 2024
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Barang Milik Negara" dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala. Namun berkat berkah dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan ini, tak lupa penulis menghaturkan terimakasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Bapak Dr. Muhammad Fahmi, S.E., M.M., CA, CPA, CRB selaku Dosen Pembimbing Akademik yang meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi sekaligus memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Umiaty Hamzani, S.E., M.Com., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, saran, pemikiran, dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhsin, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, arahan, dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ika Nur Azmi, S.E., M.Ak., Ak selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, arahan, dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam membantu kelancaran proses administrasi skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi bapak Surwanto dan Ibu Elly Hayanita terima kasih atas doa restu, kasih sayang, semangat dan material dalam menyelesaikan studi ini. Serta motivasi, pengorbanan dan kesabaran yang berlimpah pada penulis sejak kecil sampai saat ini dan seterusnya yang tidak akan pernah terbalaskan oleh penulis. Tanpa cinta, doa, dan dukungan kalian, aku tak akan bisa berdiri sejauh ini. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, dan kepercayaan yang tak pernah goyah, meski aku sering kali ragu pada diriku sendiri.
10. Terima kasih untuk saudaraku Dimo Pradisti, yang meskipun kita jarang berinteraksi, tetap menjadi bagian dari perjalanan ini. Mungkin tidak banyak kata yang terucap di antara kita, tapi aku tetap menghargai kehadiranmu dan bersyukur memiliki kamu sebagai saudaraku.
11. Tak lupa, terima kasih kepada Melo, Obi, dan Uyen, kucing-kucing kesayanganku, yang sempat menemani selama proses panjang ini. Terima kasih atas tatapan penuh rasa ingin tahu saat aku mengerjakan tugas-tugasku, atas duduk di atas laptopku ketika aku butuh istirahat, dan atas semua dengkuran lembut yang menenangkan.
12. Berbagai pihak yang tidak disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan lancar.
13. Dan yang terakhir, kepada Rayen Suzitra. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah memilih tetap berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih karena tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan mencoba. Terima kasih karena telah

menjalani segala proses yang panjang ini dan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Rayen.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hari penulis memohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pontianak, 31 Januari 2024



Rayen Suzitra
NIM. B1032211023

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

Oleh:

Rayen Suzitra
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Dalam pengelolaan aset milik negara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual merupakan aspek penting pada reformasi sektor publik. Pengelolaan BMN memerlukan perhatian khusus karena aset tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan BMN menjadi lebih kompleks dan memerlukan sistem akuntansi yang lebih efektif untuk mengawasi penggunaan aset negara. Akuntansi pemerintah berbasis akrual telah menjadi alternatif yang populer dalam pengelolaan BMN. Dengan penerapan SAP ini, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat, sehingga bisa menyediakan berita yang tepat dan andal untuk mengambil keputusan politik, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya itu, dengan pengelolaan BMN yang lebih baik, diharapkan kinerja pemerintah akan meningkat, sehingga nantinya akan menampilkan layanan yang lebih baik kepada semua orang. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang lebih rinci dan komprehensif serta meningkatkan pemahaman dan penerapan pengelolaan BMN sesuai dengan SAP berbasis akrual dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Penelusuran pustaka dilakukan melalui berbagai sumber, meliputi jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan perpustakaan, untuk memperoleh data yang sejalan dengan pembahasan penelitian. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam pengelolaan aset negara memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Barang Milik Negara

RINGKASAN SKRIPSI

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

1. LATAR BELAKANG

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual menjadi penting dalam pengelolaan aset milik negara dan reformasi sektor publik di Indonesia. Dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan, sehingga memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi.

Sejak diperkenalkannya akuntansi berbasis akrual di Indonesia pada tahun 2015, ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013, tujuan utama penerapan ini adalah untuk menyediakan laporan keuangan yang lebih andal serta relevan untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk sosial, politik, dan ekonomi.

Namun, meskipun ada potensi manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual, tantangan yang signifikan tetap ada. Banyak pemda yang mengalami kesulitan dalam mengadopsi standar ini secara efektif, disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep akuntansi berbasis akrual, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, dan komitmen organisasi yang lemah. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang kurang dan ketidakteraturan dalam penyampaian laporan keuangan juga merupakan hambatan dalam penerapan akuntansi akrual yang optimal.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemahaman pemerintah daerah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi terkait dengan kualotas dan

kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual?

3. Bagaimana komitmen dan dukungan organisasi dalam implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah?
4. Apa dampak penerapan SAP akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis dampak penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi pemerintahan, khususnya dalam konteks penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi tinjauan literatur untuk memahami penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Penulis melakukan kajian pustaka dengan menelusuri berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dokumen, internet, dan perpustakaan, guna mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria inklusi yang jelas ditetapkan untuk memilih studi dan literatur yang sesuai, serta evaluasi kualitas dilakukan pada penelitian yang dipilih. Data yang terkumpul dianalisis melalui metode kualitatif, mencakup analisis tema dan kategori untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola yang muncul. Teknik sintesis juga diterapkan untuk mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan, membantu dalam identifikasi dan pemeriksaan pola serta klasifikasi yang ditemukan. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dinilai dan diinterpretasikan dengan baik, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan akuntansi pemerintah.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintaan (SAP) berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah belum optimal. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep akuntansi berbasis akrual di kalangan pihak terkait. Penyusunan laporan keuangan masih tidak memenuhi standar yang diharapkan, dan terdapat ketidakteraturan dalam penyampaian laporan sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrual termasuk kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang

belum memadai, di mana banyak pemerintah daerah kekurangan SDM yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup mengenai akuntansi berbasis akrual. Komitmen organisasi juga sering kali lemah, yang mengakibatkan kurangnya dukungan dari manajemen untuk menerapkan SAP berbasis akrual secara efektif. Selain itu, ketersediaan perangkat pendukung yang memadai untuk proses akuntansi berbasis akrual masih menjadi masalah kritis di banyak daerah.

Akhirnya, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan tata kelola BMN dan mengadopsi praktik akuntansi berbasis akrual, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti kekurangan SDM dan komitmen organisasi. Jika tantangan ini dapat dihadapi melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas, diharapkan laporan keuangan dapat ditingkatkan, pengelolaan aset dapat menjadi lebih efektif, dan kinerja pemerintah secara keseluruhan dapat meningkat.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya komitmen organisasi, dan kurangnya perangkat pendukung teknologi informasi. Untuk mengatasi isu-isu ini, disarankan agar pemerintah daerah mengimplementasikan program pelatihan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan di bidang akuntansi, serta menunjukkan komitmen yang kuat dari manajemen dalam mendukung penerapan SAP. Selain itu, investasi dalam sistem informasi dan teknologi pendukung yang memadai sangat penting untuk memfasilitasi proses akuntansi secara efisien. Evaluasi dan pengawasan yang sistematis juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi SAP berjalan sesuai rencana, sementara kerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk akademisi dan praktisi, dapat membantu dalam berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan SAP berbasis akrual dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, serta pada akhirnya meningkatkan layanan publik yang baik.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI ii
KATA PENGANTAR iv
LEMBAR YURIDIS iii
ABSTRAK vii
RINGKASAN SKRIPSI viii
DAFTAR ISI xiiii
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.2.1 Pernyataan Masalah 5
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Kontribusi Penelitian 6
1.4.1 Kontribusi teoritis 6
1.4.2. Kontribusi praktis 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 8
2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara 8
BAB III METODE PENELITIAN 10
3.1 Jenis Penelitian 10
3.2 Waktu Penelitian 10
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 10
3.3.1 Subjek Penelitian 10
3.3.2 Objek Penelitian 11
3.4 Teknik Pengumpulan Data 12
3.5 Teknik Analisis Data 13

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 14
4.1 Hasil Pembahasan 14
4.1.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ..14
4.1.2 Pengelolaan Barang Milik Negara 19
4.1.3 Perubahan Pengelolaan BMN Setelah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 22
4.1.4 Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 25
BAB V PENUTUP 29
5.1 Kesimpulan 29
5.2 Keterbatasan 29
5.3 Saran 30
DAFTAR PUSTAKA 31
LAMPIRAN 38

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Artikel 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya UU no. 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan UU 15 Tahun 2004 menjadikan awal mula reformasi keuangan di Indonesia. Sebab dari UU yang telah disebutkan mengamanatkan bahwa dengan melihat kondisi Indonesia, diperlukan ketepatan dalam tata kelola keuangan (Good Governance) yang mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dengan melalui praktik yang bertaraf internasional (international best practices)

NPM atau New Public Management, sebuah fenomena yang dibawa oleh reformasi sektor publik, secara fundamental mengubah gagasan akuntabilitas dalam industri ini. NPM mendukung sektor publik untuk menerapkan model-model sektor swasta (Hood, 1995; Lapsley et al., 2009; Christiaens et al., 2010). Tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan perlunya menerapkan model keuangan sektor swasta untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah hal yang mendorong transformasi ini di sektor publik (Carnegie dan West, 2005). Pemerintah harus beroperasi lebih seperti bisnis swasta dengan menerapkan kebijakan dan prosedur perusahaan swasta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan yang ramping.

Beberapa makalah penelitian di ranah publik telah menyelidiki penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana didokumentasikan oleh Carlin (2005), Caccia dan Steccolini (2006), Christiaens dan Rommel (2008), serta Lapsley et al. (2009). Diawali pada akhir tahun 2003 proses penerapan reformasi keuangan negara di Indonesia dan mencapai puncaknya dengan diperkenalkannya tiga macam peraturan keuangan negara baru: tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Undang-Undang No. 15 Tahun 2005, tentang Perbendaharaan Negara di Undang-Undang No. 1 Tahun

2004, serta tentang Keuangan Negara di Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip New Public Management (NPM) di Indonesia.

Basis akrual merupakan metode akuntansi yang, sebagaimana dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2012), mencatat komunikasi dan kejadian lainnya, tanpa menghiraukan apakah setara kas atau kas dibayarkan atau diterima. Akibatnya, semua peristiwa dan transaksi segera didokumentasikan dan dimasukkan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya. Penerapan SAP berbasis akrual digagas oleh PEMDA di Indonesia pada tahun 2015. Akuntansi berbasis akrual dipandang lebih bagus dari akuntansi dengan kas karena kemampuannya memberikan laporan keuangan yang bisa diandalkan, tepat, dan relevan yang digunakan dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. (Tengku Azman, 2015).

Namun demikian, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di PEMDA menimbulkan tantangan yang signifikan. Penerapan SAP sebagaimana yang tercantum pada PP No. 71 Tahun 2010 menimbulkan tantangan yang signifikan bagi entitas pelaporan, khususnya dalam hal kecakapan pengelolaan keuangan negara dan personel akuntansi, serta terselesainya aset negara yang tidak terrekam (Hoesada, 2012).

Pada tahap awal peralihan dari standar akuntansi kas ke standar akuntansi akrual, pemerintah telah memperkenalkan praktik penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan. Penyusutan ini dihitung berdasarkan nilai buku aset, yaitu nilai perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan (Puspitarini et al., 2017). Namun demikian, laporan keuangan pemerintah belum memasukkan biaya yang terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan aset sebagai beban. Selanjutnya, pengaturan tersebut disempurnakan melalui penerbitan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Akrual) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Pratama, 2013; Rohman et al., 2018).

Pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri memberlakukan PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengaplikasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pengumuman peraturan ini dilakukan pada tanggal 6 Desember 2013. Dengan demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah dimulai pada awal tahun 2014. Peraturan Menteri ini berlaku bagi pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang standar penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, yang meliputi Bagan Akun Standar (BAS), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rekomendasi tersebut juga membahas perlakuan akuntansi atas aset tetap yang masih menjadi isu yang berulang dalam hasil pemeriksaan BPK.

Rohman, et. Al (2019) menyampaikan penerapan SAP ini dapat berdampak signifikan pada pencatatan akuntansi aset tetap pemerintah. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pengembangan sistem akuntansi pemerintah yang masih memiliki sifat sentralisasi dan top-down. Selain itu, inventarisasi aset dan sistem pencatatan yang menjadi dasar untuk menyusun aset jauh dari kata baik. Masalah lain adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan mengimplementasikan SAP (Harun, 2012; Marwata dan Alam, 2006; Robinson dan Harun, 2010).

Pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada pengelolaan kas saja, tetapi juga mencakup pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). BMN dianggap sebagai aset penting yang harus diperhitungkan dan dilaporkan dalam neraca pemerintah. Meskipun tata kelola BMN telah diatur sejak lama, namun implementasinya masih belum sesuai dengan harapan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan

baru untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, dengan harapan dapat memperbaiki pengelolaan aset negara.

Pengelolaan BMN perlu mendapat perhatian khusus karena pemanfaatannya dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, pengelolaan BMN telah berkembang semakin rumit, sehingga membutuhkan sistem akuntansi yang lebih efisien untuk memantau pemanfaatan aset pemerintah. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah muncul sebagai alternatif yang populer dalam pengelolaan BMN. Peraturan Pemerintah No. 28/2020 menyempurnakan Peraturan Pemerintah No. 27/2014 terkait Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Aturan ini memberikan pengawasan penuh terhadap pengelolaan BMN, termasuk semua tahapan mulai dari perencanaan hingga pemusnahan. Peraturan Pemerintah No. 71/2010 mensyaratkan agar penilaian BMN mematuhi Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah telah berupaya keras untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual, khususnya dalam pengelolaan BMN, sama dengan ketentuan PERPU dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan BMN secara bertahap, meliputi tiga periode utama: Akuntansi Berbasis Kas (sampai dengan tahun 2012), Akuntansi Berbasis Kas yang Beralih ke Akrual (2013-2014), dan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh (dimulai tahun 2015) (Puspitarini et al., 2017).

Tujuan penelitian ini yaitu melanjutkan kajian penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan BMN, dengan fokus pada dampak dan manfaat penerapannya. Penelitian sebelum ini yang diteliti oleh Puspitarini (2017) membahas penerapan di tingkat pemerintah pusat. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah. Hasilnya diharapkan bisa menjadikan referensi yang lebih spesifik dan luas, serta membantu meningkatkan pengetahuan dan praktik pengelolaan BMN

pada pemerintah daerah sesuai dengan SAP berbasis akrual secara efektif dan efisien.

Penerapan SAP berbasis akrual diharapkan bisa membuat peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah, sehingga memungkinkan mereka menyediakan informasi yang lebih tepat dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan politik, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya itu, dengan pengelolaan BMN yang lebih baik, diharapkan kinerja pemerintah akan semakin membaik, dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Penelitian ini dapat diharapkan berkontribusi yang berarti bagi pengembangan literatur akuntansi pemerintahan dan memberikan rekomendasi praktis bagi para pengelola keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan BMN di tingkat pemerintah daerah

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, yang berpotensi menghambat efektivitas dan kualitas pelaporan keuangan. Salah satu masalah utama adalah pemahaman dan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) mengenai akuntansi berbasis akrual, yang berperan penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya perangkat teknologi informasi dan sistem yang mendukung, yang diperlukan untuk menjalankan akuntansi berbasis akrual secara efisien. Selain itu, komitmen organisasi dan manajemen di pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi penerapan SAP, di mana rendahnya dukungan dari pimpinan dapat mengakibatkan implementasi yang tidak optimal. Selanjutnya, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan seringkali masih jauh dari standar yang diharapkan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM yang memadai.

Akhirnya, penting untuk mengevaluasi dampak penerapan SAP berbasis akrual terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, untuk memastikan bahwa tujuan reformasi sektor publik dapat tercapai secara efektif.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan masalah, maka pertanyaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman pemerintah daerah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi terkait dengan kualotas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual?
3. Bagaimana komitmen dan dukungan organisasi dalam implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah?
4. Apa dampak penerapan SAP akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah.
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis dampak penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi pemerintahan, khususnya dalam konteks penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi teoritis

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah dapat memperluas pemahaman tentang peran akuntansi berbasis akrual dalam

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor publik, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut di bidang akuntansi pemerintahan.

1.4.2. Kontribusi praktis

Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, termasuk perlunya pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyediaan sistem informasi yang mendukung, untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara lebih efektif dan efisien.

1. Bagi penulis

   Penelitian ini mencakup pengalaman dalam melakukan analisis dan sintesis literatur tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, yang dapat meningkatkan keterampilan penelitian dan penulisan mereka. Selain itu, penulis dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan solusi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berpotensi untuk diaplikasikan dalam praktik profesional mereka di bidang akuntansi dan manajemen keuangan public.

2. Bagi pembaca

   Penelitian ini memberikan penyediaan wawasan mendalam tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, termasuk manfaat, tantangan, dan solusi yang relevan. Pembaca, terutama para pengelola keuangan negara dan pemangku kebijakan, dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan Barang Milik Negara di tingkat daerah secara efektif dan efisien.